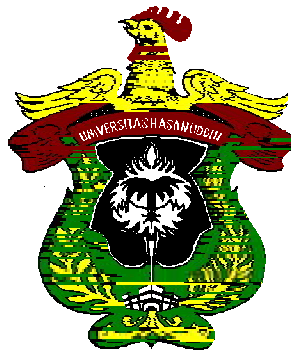


SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR**



**OLEH
NOPITASARI SUPARJO
B 121 12 135**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

**ASPEK HUKUM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Oleh

NOPITASARI SUPARJO

B 12 112 135

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

ASPEK HUKUM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:


NOPITASARI SUPARJO

B121 12 135

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 8 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,




Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
NIP. 19661018 199103 1 002

Sekretaris,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwal skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nopitasari Suparjo
Nomor Pokok : B121 12 135
Prodi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
NIP. 19661018 199103 1 002

Pembimbing II



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NOPITASARI SUPARJO**
No. Pokok : B121 12 135
Prodi : Hukum Administarsi Negara
Judul Skripsi : Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Nopitasari Suparjo (B121 121 35) Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan Judul Skripsi *Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*. Dibimbing oleh Irwansyah dan Zulkifly Aspan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar dan mengetahui aspek yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar

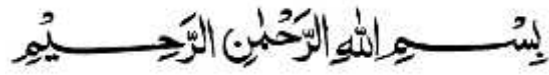
Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah, diketahui sampai pada akhir tahun 2015 jumlah presentase ruang terbuka hijau atau RTH Kota Makassar ialah 8,31%, jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan penyediaan RTH yang diatur dalam peraturan penataan ruang.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Makassar mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar diantaranya Peraturan Daerah tentang Penghijauan, Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Pelaksanaan penyediaan RTH Kota Makassar meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Aspek yang mempengaruhi penyediaan RTH Kota Makassar yakni pendukung dan penghambat, aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dan acuan dalam mengatur penyediaan dan penataan RTH, program penghijauan seperti lorong *garden* dan *vertical garden*, serta inventarisasi RTH sebagai pendukung penyediaan RTH karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH. Sementara untuk aspek penghambat yang mempengaruhi penyediaan RTH meliputi minimnya ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan di perkotaan.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil 'Alamin segala puji bagi ALLAH SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum. Tidak lupa Shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat – sahabat beliau. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan sehingga dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang senantiasa bersifat membangun juga penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada orang tua yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yaitu Ibunda Hj. Nuraeni dan Ayahanda H. Ir. Suparjo, atas segala limpahan kasih sayang, didikan, dukungan,

serta doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan untuk penulis dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, juga terima kasih kepada saudara – saudara penulis Putri Itani Puspitasari Suparjo, Dwi Oktania Suparjo, Tri Suciani Suparjo, atas segala dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Staf dan Jajarannya
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muhtar, S.H., M.H., Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, petunjuk, solusi, dan motivasi dalam menjalani perkuliahan.
4. Pembimbing I Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing II Dr. Zulkifly Aspan, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya

untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Para Penguji Prof. Dr. Yunus Wahid, S.H., M.Si., Dr. Hasbir, S.H., M.H., ibu Eka Merdekawari Djafar, S.H., M.H. atas segala saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan selama menjalani perkuliahan
7. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang telah membantu memberikan data terkait penulisan skripsi.
8. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya
9. Teman-teman Petikum 2012 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya teman teman angkatan 2012 di Prodi Hukum Administrasi Negara terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu ada. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Aamiin
10. Teman-teman terkasih dan tersayang dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Andi Annisa Tiara Marina, Hadriana Hatta, Shita Mariza, Yuli Hardianti, Suci Indrawati tempat berbagi cerita, suka dan duka, atas segala

kebersamaan, dukungan, semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan.

11. Keluarga besar ALSA LC UNHAS dan HLSC yang memberikan pengalaman dan pengetahuan baru

12. Teman – teman delegasi NMCC MA Tahun 2015, atas kebersamaan, semangat dan motivasi kepada penulis

13. Teman - teman KKN Tematik Padang, atas kebersamaan dan dukungan kalian.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah dariNya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Makassar, Juni 2016

Penulis

NOPITASARI SUPARJO

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Rencana | 9 |
| 1. Pengertian Rencana | 9 |
| 2. Karakter Hukum Rencana | 10 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup | 12 |
| 1. Pengertian Lingkungan Hidup | 12 |
| 2. Pengertian Hukum Lingkungan | 14 |
| 3. Penegakan Hukum Lingkungan | 17 |
| 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang | 23 |
| 1. Pengertian | 23 |
| 2. Dasar Hukum Tata Ruang | 25 |

| | |
|---|----|
| 3. Perencanaan Tata Ruang | 29 |
| D. Ruang Terbuka Hijau | 31 |
| 1. Pengertian | 31 |
| 2. Jenis dan Penggolongan Ruang Terbuka Hijau ... | 34 |
| 3. Tujuan Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau | 36 |
| 4. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau..... | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Metode Pendekatan | 42 |
| B. Lokasi Penelitian | 42 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| D. Populasi dan Sampel | 43 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| A. Peraturan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar | 46 |
| B. Aspek yang Berpengaruh Pada Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar | 53 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| LAMPIRAN..... | 72 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Rencana Pemenuhan RTH Kota Makassar Tahun 2034 . | 52 |
| Tabel 2. Rangkuman RTH Kota Makassar Tahun 2015 | 55 |
| Tabel 3.RTH Eksisting (Ha) Tahun 2015 | 56 |
| Tabel 4. Kebutuhan dan Kekurangan RTH Kota Makassar | 57 |
| Tabel 5. Perubahan RTH Kota Makassar | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Tipologi Ruang Terbuka Hijau..... | 35 |
| Gambar 2. Penertiban Lahan Untuk Pemanfaatan RTH..... | 58 |
| Gambar 3. Pemanfaatan Lahan untuk Menambah Proporsi RTH . | 59 |
| Gambar 4. Lorong <i>Garden</i> Percontohan..... | 60 |
| Gambar 5. Pembangunan di Lahan RTH..... | 65 |
| Gambar 6. Pembangunan di Lahan RTH..... | 66 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain - lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana infrastruktur yang harapannya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan.

Meskipun pembangunan merupakan salah satu sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan, namun demikian setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan terutama terhadap lingkungan.¹ Pesatnya laju pembangunan seolah menjadi penghalang bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah.² Kenyataan tersebut berdampak kepada

¹N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 19.

² Irwansyah, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta, 2013, hlm. 11

sulitnya masyarakat di perkotaan mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.

Padahal kehidupan manusia sangat tergantung kepada lingkungan hidup, daya dukung lingkungan yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia harus tetap terjaga agar lingkungan dapat maksimum dalam mendukung kehidupan manusia.

Kebutuhan akan Lingkungan hidup telah diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan juga sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pada BAB X berdasarkan amandemen kedua UUD 1945 Mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 28H angka 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Kenyataannya saat ini permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia ialah sulit untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.

Pesatnya kegiatan pembangunan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sebagai pusat dari kegiatan sosial ekonomi tidak hanya berdampak kepada sulitnya masyarakat perkotaan untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman namun juga berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan ruang kota dan tekanan pemanfaatan ruang kota, yang akhirnya mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan

untuk kegiatan komersil dan pemukiman sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ruang publik sebagai tempat hiburan berupa fasilitas umum dan sosial sulit untuk ditemukan. Padahal di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kompleksnya masalah di perkotaan yang disebabkan oleh tingginya laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang akhirnya berujung kepada sulitnya mendapatkan lingkungan yang bersih nyaman dan besarnya tekanan pemanfaatan ruang serta alih fungsi lahan kemudian menjadi acuan untuk membangun kota yang ekologis dan berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan cara membentuk Ruang Terbuka Hijau atau RTH, Ruang terbuka hijau di perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang memberikan manfaat ekologi yang tinggi tidak hanya untuk mempertahankan kualitas lingkungan tetapi RTH juga menjadi kebanggaan dan identitas warga kotanya. Ruang terbuka hijau juga memberi arti penting dari struktur pembentuk kota yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologi kota, serta memiliki fungsi tambahan seperti fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi estetik dan arsitektural kota.³ Dibutuhkan strategi pemanfaatan dan

³ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 95.

penataan ruang demi menjaga keberadaan ruang terbuka hijau sebagai penunjang ekologi diperkotaan dan agar tidak terlindas oleh perkembangan pembangunan.

Pentingnya keberadaan RTH ditunjukkan dalam kesepakatan dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas kembali dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% .⁴Kesepakatan tersebut kemudian oleh Pemerintah Indonesia dituangkan dalam Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana perubahan atas Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang.

Ketentuan Penyediaan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih serta sebagai sarana pembangunan lingkungan perkotaan yang dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

⁴ *Ibid.*, hlm. 92

Penyediaan RTH sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekologis kota sebesar 30% belum terpenuhi di beberapa kota di Indonesia, Koordinator Kampanye dan Advokasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Cut Nurhayati dalam wawancara dengan *voaIndonesia*⁵ menyebutkan Ruang terbuka hijau di sebagian kota di tanah air masih cukup minim, mengingat kebanyakan kegiatan pembangunan di Kota – kota yang ada di Indonesia direncanakan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Kota Makassar misalnya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dengan peningkatan penduduk dan pembangunan yang pesat belum mampu menyediakan kebutuhan RTH sebesar 30%. Presentase RTH Kota Makassar yang diperoleh dari hasil identifikasi terakhir masih jauh dari kebutuhan RTH sebuah kota. Jumlah RTH Makassar yakni hanya 8 Persen dari total luas wilayah.⁶ Jumlah tersebut masih jauh dari ketentuan perundang – undangan yang diatur dalam Undang – undang Penataan Ruang. Padahal fungsi dan manfaat RTH sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan akan sangat berperan dalam pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁷

Oleh sebabnya sebagai upaya untuk mengendalikan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang tentang Penataan

⁵ m.voaindonesia.com/a/penerapan-kebijakan-ruang-terbuka-hijau-rth-di-indonesia-minim/1521006.html

⁶ Hasil wawancara prapenelitian dengan Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam BLHD Kota Makassar, pada tanggal 21 desember 2015

⁷ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *Loc.Cit.*, hlm. 95.

Ruang yang di dalamnya mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau, inti dari regulasi tersebut antara lain penyediaan ruang terbuka hijau diperkotaan harus sebesar 30% dari luas wilayah yang diantaranya ialah ruang terbuka hijau privat sebesar 10% dan publik sebesar 20%.

Mengingat pentingnya keberadaan RTH untuk menjaga keseimbangan lingkungan di perkotaan dan telah adanya regulasi mengenai penyediaan ruang terbuka hijau kemudian membuat pertanyaan muncul seberapa besar perhatian pemerintah Kota Makassar dalam mengatur penyediaan ruang terbuka hijau dan seperti apa pelaksanaan penyediaan RTH, faktor faktor apakah yang berpengaruh dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar ?
2. Aspek apakah yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di kota makassar
2. Untuk mengetahui aspek apa yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di kota makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini, maka penulis mengharapkan akan adanya manfaat, antara lain :

1. Kegunaan teoritis :
 - a. Dapat menjadi masukan terkait upaya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam penyediaan dan penataan ruang terbuka hijau khususnya di kota makassar.
 - b. Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak khususnya masyarakat kota makassar akan pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan.
 - c. Diharapkan dapat menjadi literatur bagi semua seluruh pihak terkait dalam menangani penyediaan ruang terbuka hijau di kota Makassar

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam pengambilan kebijakan terkait penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perencanaan

1. Pengertian Rencana

Pada negara hukum kemasyarakatan modern, rencana selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi negara tidak dapat lagi dihilangkan dari pemikiran. Rencana-rencana dijumpai pada pelbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya pengaturan tata ruang, pengurusan kesehatan dan pendidikan.⁸ Pada kenyataannya, hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan membuat rencana-rencana dalam rangka menjalankan kegiatannya.⁹

Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur), demikian Belinfante dalam bukunya *“Kort Begrip van het Administratief Recht”*.¹⁰ Dengan sendirinya, hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang memiliki arti bagi hukum administrasi negara. Suatu rencana menunjukkan kebijaksanaan apa yang akan dijalankan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu.

⁸Philipus M. Hadjon dan Kawan-kawan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 156.

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 142.

¹⁰Philipus, *Loc.Cit.*, hlm.156

P.de Haan dan kawan-kawan menguraikan bahwa konsep perencanaan dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.¹¹ Perencanaan itu sendiri terdiri dari *prognoses* (estimasi yang akan terjadi), *beleidsvoornemens* (rancangan kebijakan yang akan ditempuh), *voorzieningen* (perlengkapan persiapan), *afspraken* (perjanjian lisan), *beschikkingen* (ketetapan-ketetapan), dan *regelingen* (peraturan – peraturan).¹²

2. Karakter Hukum Rencana

Menurut H.D. van Wijk/konijnenbelt, perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijakan, yang dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum. Dengan kata lain, perencanaan adalah proses kebijaksanaan. Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan perwujudan dari hukum, sehingga tunduk pada norma-norma hukum.¹³

Rencana merupakan suatu peraturan umum yang bersifat mengikat (*Algemeen Verbindende Regeling*), sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa rencana itu suatu ketetapan (*beschikking*), suatu rencana merupakan pengaturan yang bersifat umum, karena rencana merupakan suatu bentuk kebijaksanaan pemerintahan.¹⁴ Jadi suatu rencana merupakan salah satu sarana untuk menstrukturkan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan pembentukan

¹¹Ridwan. HR, *Op.Cit.*, hlm. 144

¹²*Ibid.*, hlm. 145

¹³*Ibid.*, hlm. 149

¹⁴Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 7

norma-normanya secara umum, dimana hal-hal yang sama diberlakukan secara bersama pula. Pembentukan norma-norma hukum demikian itu dapat dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dengan peraturan kebijaksanaan.

Dengan mendasarkan rencana pada pengertian sebagaimana disebutkan di atas, yakni peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, keputusan, dan juga ketetapan, dan dengan membandingkannya dengan bentuk bentuk hukum rencana yang ada di Indonesia, dapat dikatan bahwa rencana memiliki sifat hukum yang beragam. Keragaman sifat hukum dari rencana ini akan dapat diketahui dengan melihat pada organ yang membuat, isi rencana, dan sasaran rencana tersebut dengan cara demikian, akan diketahui pula akibat-akibat hukum dari relevansi hukum yang muncul dari rencana tersebut.

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek mengemukakan empat pendapat tentang sifat hukum rencana, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Rencana adalah ketetapan atau kumpulan berbagai ketetapan (*Het Plan is een beschikking of bundle van beschikkingen*)
- b. Rencana adalah sebagian kumpulan dari ketetapan, sebagian kumpulan dari ketetapan-ketetapan, sebagai peraturan, peta dengan penjelasan adalah kumpulan keputusan-keputusan; penggunaan peraturan memiliki sifat peraturann (*Het plan is deels (bundle van) beschikking (en), deels regeling; de kaart met toelichting is de bundle beschikkingen; de gebruiksvoorschriften hebben het karakter van de regeling*).
- c. Rencana adalah bentuk hukum tersendiri (*Het plan is een rechtsfiguur sui generis*).

¹⁵*Ibid.*, hlm. 8

d. Rencana adalah peraturan perundang-undangan (*He plan is een regeling*).

B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Dari lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan - tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga, selain itu atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berkreasi mengembangkan bakat atauseri. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian, bagian – bagian atau komponen lain mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.¹⁶

Istilah lingkungan hidup dalam bahasa inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa prancis disebut *l'environnement*.¹⁷

¹⁶ N.H.T Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

Makna lingkungan hidup menurut Undang – undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain”

Beberapa ahli juga mendefenisikan mengenai lingkungan hidup yang merupakan penunjang kehidupan manusia. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli yang dikutip oleh R.M. Gatot P. Soemartono¹⁸ antara lain sebagai berikut :

Menurut Emil Salim secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan pengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Moenajat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kesejahteraan hidup dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.

¹⁸R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 17.

Otto Soemarwoto berpendapat lingkungan adalah sejumlah benda dan kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, jadi lingkungan hidup harus diartikan luas yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi tetapi juga lingkungan ekonomi sosial dan budaya.

Masalah Lingkungan Hidup baru secara Formal baru menjadi Perhatian Dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 6 juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan *United Nation Conference On Human Environtment*. Konferensi tersebut berhasil melahirkan kesepakatan International dalam menangani masalah Lingkungan Hidup, dan mengembangkan hukum Lingkungan baik pada tingkat Regional, Nasional, maupun International.¹⁹

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan Hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam artinya berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam

¹⁹Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 2

terhadap kemerosotan mutu dan kerusakannya, dengan kata lain keharusan menjaga kelestarian. Dalam kaitan itu, lahir jenis hukum yang secara khusus diciptakan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup (alam) yang dinamakan “Hukum Lingkungan Hidup” atau secara singkat disebut Hukum Lingkungan.²⁰

Adanya persetujuan mengenai keberadaan hukum yang mengatur mengenai lingkungan, mengakibatkan banyaknya perbedaan dalam berbagai literatur diantaranya dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan jerman menyebutnya *umweltrecht*, prancis menamainya *droit de environment*, malaysia dengan bahasa melayu memberi nama *hukum alam sekitar*, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah pelbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, pengrusakan (*verontreiniging, uitputting en aantasting*) lingkungan (fisik).²¹

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Lingkungan Prof. Yunus Wahid berpendapat bahwa istilah Hukum Lingkungan atau *Environmental Law* merupakan istilah umum dikenal dan digunakan dalam mengungkapkan substansi hukum yang dimaksud, dipahami, mudah diingat, enak diucapkan, dan lebih praktis.²²

Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam

²⁰ R.M. Gatot P. Soemartono, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

²² Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Penerbit Arus Timur, Makassar, 2014, hlm. 112.

(natuurlijk milieu) dalam arti seluas luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelola lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.²³

Hukum Lingkungan Hidup merupakan Instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, dikatakan Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukum adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.²⁴

Moenadjat Danusaputro kemudian membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment-oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*. Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi generasi yang akan mendatang. Sebaliknya Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan

²³Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 38.

²⁴Syahrul Machmud, *Op.Cit.*, hlm. 3.

eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁵

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Semakin meluasnya kerusakan alam dan penurunan kualitas lingkungan di seluruh dunia, yang diringi dengan semakin besarnya perhatian manusia tersebut terhadap persoalan lingkungan hidup, timbul kebutuhan untuk diadakannya forum dunia yang secara khusus untuk itu. Hal inilah yang mendorong bangsa-bangsa menyelenggarakan *United Nations Conference On Human Environment* di Stockholm, swedia yang dibuka pada 5 Juni 1972.²⁶ Konferensi Stockholm telah menegaskan dalam rumusan kedua dari hasil konferensi bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap ummat manusia dan setiap pemerintah dari seluruh dunia.²⁷

Konferensi yang diikuti oleh 113 negara tersebut telah melahirkan kesepakatan international dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup national, regional, maupun international.²⁸ Deklarasi Stockholm mengakui menikmati lingkungan yang baik dan sehat adalah hak perlindungan setiap orang atas pencemaran

²⁵Koesnadi Hardjasoemantri, *Loc.Cit.*, hlm 38

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 148-149

²⁷Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 2

²⁸Syahrul Machmud, *Loc.Cit.*, hlm. 2

lingkungan dan sumber kekayaan alam sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Hak asasi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat diadopsikan ke dalam gagasan UUD 1945 tentang kekuasaan pasca perubahan keempat Tahun 2002 yaitu (i) penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi dan (ii) peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar, yang kemudian tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.²⁹

Setelah berlangsungnya konferensi stockholm, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil langkah lebih lanjut dibidang pengelolaan lingkungan hidup antara lain membentuk kelompok kerja dengan tugas menyusun rancangan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang pengelolaan lingkungan hidup, kelompok kerja tersebut kemudian menghasilkan suatu rancangan Undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pada tanggal 11 maret 1982 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang – Undang menjadi Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup . dengan demikian Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 merupakan sumber

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*, hlm. 79

formal pertama bagi lahirnya dan pengembangan hukum lingkungan modern di Indonesia.³⁰

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, maka Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UULH, setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, dipembaharuan menjadi Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan, selanjutnya UUPPLH ini pada 3 oktober 2009 telah diubah menjadi Undang – Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya disebut UUPPLH. UUPPLH tersebut berlaku berlaku sebagai payung dalam penegakan hukum atau disebut *kaderwet*

Sebagai Undang – Undang pokok maka UUPPLH mempunyai ciri sebagai mana tercantum dalam penjelasan umum, yaitu adanya penguatan tentang prinsip - prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pengelolaan yang baik karena setiap permusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,

³⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 49

partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Juga diatur instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan instrument lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kehadiran UUPPLH tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memadukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi upaya penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, karena tugas yang demikian itu maka UUPPLH sifatnya berlaku lintas sektoral (*cross sectors*), dan sifatnya yang lintas sektoral ituah maka UUPPLH tersebut berfungsi sebagai andasan untuk menilai dan menyesuaikan peraturan perundang – undangan dibidang pengairan, perindustrian, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain – lain.³¹

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Keberlanjutan pembangunan di suatu daerah atau negara ditentukan oleh kemampuan daerah atau negara tersebut dalam

³¹ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 6

mengelola lingkungan hidupnya. Pendekatan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan menata sistem pengelolaannya.

Pasal 14 UUPPLH menyebutkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya juga sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Instrumen-instrumen tersebut dalam pasal 14 UUPPLH adalah : (1) Kajian Lingkungan Hidup strategis,(2) tata ruang,(3) baku mutu lingkungan hidup,(4) kriteria baku mutu lingkungan hidup,(5) AMDAL,(6) UKL-UPL,(7)Perizinan,(8) instrumen ekonomi,(9) peraturan erundang-undangan berbasis lingkungan hidup,(10) anggraran berbasis lingkungan hidup,(11) analisis berbasis lingkungan hidup,(12) audit lingkungan hidup.³²

Pengelolaan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diikuti dengan kata “perlindungan”, yang mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung Jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, Manfaat, kehati-hatian, Keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipasi, kearifan lokal, tata kelolah pemerintahan yang baik, otonomi daerah. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan

³²Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 86

kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.³³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yakni pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut adalah adanya kata-kata pembangunan berwawasan lingkungan, yang dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termaksud sumber dayanya ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang.³⁴

³³Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

³⁴Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 145

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga merupakan salah satu konsep yang muncul dari diadakannya konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia. Kedua konsep tersebut menekankan pada pentingnya keberlangsungan kelestarian antar manusia, sumber daya, dan lingkungan dalam pembangunan.³⁵

Sustainable development pada dasarnya sama dengan prinsip *Ecodevelopment*, dimaknakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan (Prinsip 1 dan 2 Deklarasi Stockholm). *Ecodevelopment* diartikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang kemudian diakomodir dalam sistem kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang

1. Pengertian

Berbicara dalam konteks tata ruang (TR) dan penataan ruang (PR), “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *space* (Inggris), *raum* (Jerman), dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai bidang datar (*planum*-planologi) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (dwelling house) yang harus ditta sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. Ruang

³⁵Syahrul, *Op.Cit.*, hlm. 28

³⁶N.H.T Siahaan, *Op.Cit.*, hlm 10.

sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari tiga unsur: bumi, air, dan udara, mempunyai tiga dimensi.³⁷

Ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 angka 1 ialah “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 1 angka 5 undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa “penataan ruang ialah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang”

Hasan Purbo mendefinisikan tata ruang sebagai suatu wujud struktural manfaat dan fungsi ruang yang terjadi karena proses-proses sosial, ekonomi, teknologi, politis, administratif (termaksud perubahan secara berencana) dan alamiah, dalam pengertian tersebut maka tata ruang merupakan suatu ungkapan kenyataan obyektif. Lebih lanjut hasan purbo mengemukakan bahwa sebagian lingkungan sosial dan lingkungan fisik dapat diartikan sebagai tata ruang.³⁸

³⁷A.M.Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 1

³⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, hlm 44-45

Tata ruang selalu berkaitan dengan lahan, tempat, wilayah, dan waktu. Ia merupakan sarana dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal sebagai arahan kebijakan.³⁹

Tata ruang dalam penekanan “tata” diharapkan dapat mengembangkan fungsi yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA antara lain : (1) mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan ruang yang terkandung di dalamnya; (2) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan ruang; dan (3) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang mengenai perbuatan hukum menyangkut ruang. Adapun penataan ruang dengan tekanan pada “ruang” diharapkan dapat mengembangkan fungsi pasal 2 ayat 3, dan 4 UUPA yaitu : (1) Fungsi pembagian peruntukan dan penggunaan SDA; dan (2) fungsi pengelolaan (hak menguasai, pengelolaan, dan pemberian perizinan).⁴⁰

2. Dasar Hukum Tata Ruang

Konsep dasar hukum penataan ruang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....” ketentuan ini menegaskan

³⁹A.M.Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang, Op.Cit.*, hlm. 13

⁴⁰*Ibid.*, hlm.44-45

“kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia, yakni segenap bangsa Indonesia sebagai “komponen manusia” dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai komponen sumber daya alam hayati sebagai “komponen fisik” dalam lingkungan hidup Indonesia. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan semua umat manusia pada umumnya.⁴¹

Selanjutnya pemikiran dasar tersebut dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.

Diundangkannya ketentuan mengenai lingkungan hidup pada tahun 1982 merupakan awal dari diadakannya kebijakan penataan ruang, dikarenakan dalam ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1982 terkandung amanat mengenai pengaturan dan peruntukan bagi SDA dan SDB Indonesia dalam peraturan perundang – undangan. Artinya

⁴¹*Ibid.*, hlm. 74

mengamanatkan supaya diadakannya penataan ruang guna mewujudkan keserasian dan keseimbangan, inilah yang merupakan dasar dan sumber hukum secara langsung bagi penataan ruang wilayah yang pertama bagi Indonesia.⁴²

Pada 13 Oktober 1992 diundangkanlah Undang – Undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, yang juga merupakan UU penataan ruang pertama bagi Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya UU penataan ruang. Semakin kompleksnya kebutuhan terhadap pengaturan penataan ruang mengakibatkan terbentuknya UU penataan ruang baru, yakni Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sejalan dengan hal tersebut juga membuat diundangkannya Peraturan Pemerintah terbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yang menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang berlaku (1997-2008) menjadi (2008-2028).

Mengingat “ruang” merupakan bagian penting dari Lingkungan Hidup maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan keberhasilannya juga ditentukan oleh pelaksanaan Penataan Ruang. Pasal 19 UUPPLH dengan tegas dengan menyebutkan tata ruang sebagai salah satu instrumen yuridis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁴²*Ibid.*, hlm. 75

yang pada intinya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.⁴³

Dalam hal “persamaan asas” menurut Undang – Undang penataan ruang maupun Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai 3 (tiga) asas utama yakni : Asas Keserasian dan keseimbangan, Asas Keberlanjutan dan kelestarian, Asas Keadilan.⁴⁴

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang menyebutkan tujuan penataan ruang ialah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdalandakan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : a. Terwujudnya kehormatan antra lingkungan alam dan lingkungan buatan; b.terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

⁴³*Ibd.*, hlm. 76

⁴⁴Hasni, *Op.Cit.*, hlm 391

3. Perencanaan Tata Ruang

Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik disebut penataan ruang. Dalam pengertian ini , penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.⁴⁵

Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan merumuskan dan menetapkan manfaat ruang dan kaitannya atau hubungan antara berbagai manfaat ruang, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang perlu dan dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Tingkat manfaat ruang ini juga akan sangat bergantung kepada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia atau dapat disediakan secara optimal. Dengan demikian perencanaan tata ruang akan menghasilkan rencana- rencana tata ruang untuk memberikan gambaran tentang ruang mana untuk kegiatan apa dan kapan.⁴⁶

Dalam Penjelasan umum UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang merupakan merupakan wujud pelaksanaan penataan ruang sebagai upaya pencapaian tujuan penataan ruang.

⁴⁵M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2001, hlm 80.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 81

Tata Ruang merupakan salah satu Instrumen pencegahan dan/pencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 4 UUPPLH, oleh sebabnya dalam menyusun rancangan tata ruang perlu untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, demi menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang.⁴⁷ Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat pemukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sementara rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.⁴⁸

Dengan pendekatan wilayah administrasi, penataan ruang seluruh wilayah NKRI terdiri atas wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah sesuai wilayah administrasinya juga diatur dalam UU penataan ruang, yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang pada di masing-masing wilayah yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

⁴⁷Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

⁴⁸Ketentuan Pasal 17, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)

D. Ruang Terbuka Hijau

Penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan wilayah adminstrasinya penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Di dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang, telah diatur bahwa perecanaan tata ruang wilayah kabupaten kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.⁴⁹

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai penyeimbang ekosistem, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kabupaten/kota, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life, human well being*).⁵⁰

1. Pengertian

Berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya Ruang Terbuka Hijau, mengartikan ruang terbuka hijau antara lain sebaga berikut :

⁴⁹Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*, hlm. 3

⁵⁰ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau disebutkan bahwa pengertian “Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, mengartikan ruang terbuka hijau dalam pengelompokan ruang terbuka hijau perkotaan sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Berbagai referensi menunjukkan bahwa RTH (*green open space/green space*) merupakan lahan-lahan alami yang ada di wilayah perkotaan. Bentuk RTH yang berupa fasilitas umum/publik, sebagai tempat beraktivitas, adalah taman kabupaten, taman pemakaman,

lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif.⁵¹

Jadi, ruang terbuka hijau merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri RTH di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.⁵²

Lebih lanjut Nirwono Joga dan Iwan Ismaun dalam bukunya RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau mengemukakan bahwa Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diartikan sebagai kawasan yang mempunyai unsur dan struktur alami yang harus diintegrasikan dalam rencana Tata Ruang Kabupaten, Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Regional sebagai satu kesatuan sistem. Pola jaringan RTH dengan berbagai jenis dan fungsinya merupakan rangkaian hubungan dan kesatuan terpadu yang membentuk infrastruktur hijau (*green infrastructure*) atau infrastruktur ekologis (*ecological infrastructure*).⁵³

⁵¹*Ibid.*, hlm. 91.

⁵²*Ibid.*, hlm. 92.

⁵³*Ibid.*, hlm. 87.

2. Jenis dan Penggolongan Ruang Terbuka Hijau

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi⁵⁴:

- 1) Kawasan hijau pertamanan kota
- 2) Kawasan hijau hutan kota
- 3) Kawasan hijau rekreasi kota
- 4) Kawasan Hijau kegiatan olahraga
- 5) Kawasan hijau pemakaman
- 6) Kawasan hijau pertanian
- 7) Kawasan Hijau Jalur hijau
- 8) Kawasan hijau pekarangan

Berbagai pengertian yang selama ini dikenal, seperti dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. RTH merupakan bagian dari ruang terbuka (*open space*) yang diklasifikasikan sebagai ruang atau lahan yang mengandung unsur dan struktur alami. RTH ini dibedakan dalam dua macam⁵⁵ : RTH alami dan RTH Binaan.

RTH alami terdiri atas daerah hijau yang masih alami (*wilderness areas*), daerah hijau yang dilindungi agar tetap dalam kondisi alami (*protected areas*), dan daerah hijau yang difungsikan sebagai taman public tetapi tetap dengan mempertahankan karakter alam sebagai basis tamannya (*natural park areas*).

RTH binaan terdiri atas daerah hijau di perkotaan yang dibangun sebagai taman kota (*urban park areas*), daerah hijau yang dibangun dengan fungsi rekreasi bagi warga kota, (*recreational areas*), dan daerah hijau antar bangunan maupun halaman-halaman bangunan yang digunakan sebagai area penghijauan (*urban development open space*). Khusus daerah hijau di kawasan

⁵⁴Hasni., *Op.Cit.*, hlm. 229.

⁵⁵Nirwono Joga dan Iswan Ismaun, *Op.Cit.*, hlm 92-94

perkotaan dapat dikembangkan sebagai plaza, *square*, jalur hijau jalan, maupun sabuk hijau kota (*greenbelt*).

GAMBAR 1.

Tipologi Ruang Terbuka Hijau

| | FISIK | FUNGSI | STRUKTUR | KEPEMILIKAN |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Ruang Terbuka Hijau (RTH) | RTH Alami | Ekologis | Pola Ekologis | RTH Privat |
| | | Sosial Budaya | | |
| | RTH Non Alami | Estetika | Pola Planologis | RTH Publik |
| | | Ekonomi | | |

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Klasifikasi RTH berdasarkan tipologi⁵⁶ antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Fisik terdiri dari : (a) RTH Alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional; (b) RTH Non Alami/Binaan, yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan.
2. Berdasarkan Struktur Ruang terdiri dari: (a) RTH dengan pola ekologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar; (b) RTH dengan pola planologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

⁵⁶Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Op.Cit.*, hlm. 6

3. Berdasarkan Kepemilikan terdiri dari : (a) Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud ruang terbuka hijau antara lain adalah, taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai; (b) Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dimaksud ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan

4. Berdasarkan Fungsi terdiri dari : (a) Fungsi Ekologis; (b) Fungsi Sosial Budaya; (c) Fungsi Arsitektural/Estetika; (d) Fungsi Ekonomi.

3. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

3.1 Tujuan Penyelenggaraan RTH

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah: a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; c. Meningkatkan

keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman d. lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.⁵⁷

Tujuan pembangunan RTH sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan; menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan menciptakan kota yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan.⁵⁸

Tujuan Penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

- a. menjaga keserasiaan dan keseimbangan ekosistem perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

3.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau memiliki Fungsi Sebagai berikut :⁵⁹

- a. Fungsi Utama (intrinsik), yaitu fungsi ekologis: (1) memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru – paru

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 5

⁵⁸Nirwono Joga dan Iswan Ismaun, *Op.Cit.*, hlm 97

⁵⁹Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Op.Cit.*, hlm. 5-6

kota); (2) pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; (3) sebagai peneduh, (4) produsen oksigen, (5) penyerap air hujan, (6) penyedia habitat satwa; (7) penyerap polutan media udara, air, dan tanah; (8) serta penahan angin.

b. fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu : (1) fungsi sosial dan budaya : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelarhan dalam mempelajari alam. (2) fungsi ekonomi : sumber produk yang bisa dijual seperti bunga, buah, daun, sayur mayur dan menjadi bagian dari usaha pertanian perkebunan, kehutanan, dan lain – lain. (3) fungsi estetika : meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan pemukiman maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; menstimulasi kreaktifitas dan produktifitas warga kota; pembentuk faktor keindahan arsitektural; menciptakan suasana rapih dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati.

3.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:⁶⁰

- a. Manfaat Langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teguh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan bahan untuk dijual (kayu, daun, bungat, buah)
- b. manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *Intangible*), yaitu embersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan atas kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

4. Dasar Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Terjadinya efek rumah kaca (*green house effect*) yaitu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi telah mengakibatkan pemanasan bumi. Berbagai pertemuan tingkat local, nasional, regional, hingga internasional terus digelar. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brasil (1992), KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), dan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark (2009) merupakan pertemuan berbagai Negara di dunia yang berupaya mengurangi dampak pemanasan bumi.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 6

⁶¹ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *Op.cit.*, hlm 92

Dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (EarthSummit II, 2002) disepakati bahwa kabupaten-kota harus menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas kabupaten untuk keseimbangan ekologis. Artinya, penyediaan RTH untuk fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbon dioksida sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan kabupaten (*urban heat island*).⁶²

Peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai wujud dari kesepakatan KTT tersebut diatas antara lain tertuang dalam :

1. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Pasal 1 Butir 21, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31)
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

⁶²*Ibid.* hlm.92

Berikut bunyi Pasal 29 yang mengatur RTH dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Dijelaskan pula dalam penjelasan mengenai Pasal 29 antara lain sebagai berikut⁶³ :

- a. Ayat (1) bahwa Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- b. Ayat (2) Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.
- c. Ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (duapuluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat

⁶³Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yakni mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ialah di Kota Makassar dengan sasaran penelitian yaitu perangkat Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁶⁴, antara lain dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terkait masalah yang dibahas dengan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan penelitian.

⁶⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 30

b. Data Sekunder : Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶⁵

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁶⁶ Selanjutnya Populasi dalam penelitian terdiri dari 6 orang yang masing masing merupakan bagian dari Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang keseluruhannya bertugas melaksanakan penyediaan, penataan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam suatu penelitian ilmiah merupakan sesuatu hal yang penting, karena kesimpulan pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.⁶⁷ Dalam penelitian ini, pengambilan sampel pada tahap pertama dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan maksud untuk menentukan sampel dari pelbagai pertimbangan dan alasan dalam hal ini menentukan sampel dari populasi dalam lingkup Pemerintah Kota

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 30

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 95

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 97

Makassar dengan tugas penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, selanjutnya pengambilan sample pada tahap kedua dilakukan penentuan dengan menggunakan teknik *judgement sampling*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

1. Mengumpulkan data primer (*field research*), yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan responden atau nara sumber dengan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini.

2. Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, hasil hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana, kamus-kamus, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulakn dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan

dianalisis secara deduktif yaitu dengan belandaskan kepada dasar dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peraturan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

1. Gambaran Umum Penataan Ruang di Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa dan total luas wilayah sebesar 199,26 km². Berdasarkan wilayahnya Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan yakni Biring Kanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Wajo dan Kelurahan Sangkarrang.

Dari aspek pembangunan dan infrastruktur Kota Makassar tergolong kedalam salah satu kota metropolitan dan yang terbesar di Indonesia Timur. Kota Makassar berperan sebagai pusat pelayanan di yang meliputi pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerinthan serta sebagai pusat pelayanan pendidkan dan kesehatan.

Sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia terus berbenah diri termaksud dalam hal penataan ruang. Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam penataan ruang, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan reguasi mengenai penataan ruang untuk mengarahkan pembangunan di Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034, sebagai upaya pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan terhadap peningkatan pembangunan di Kota Makassar.

Penataan ruang di Kota Makassar ditetapkan melalui kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah yang meliputi pengembangan struktur kota, Pengembangan pola ruang kota, dan pengembangan kawasan strategis kota.

Pengembangan struktur kota dalam penataan ruang di Kota Makassar dilaksanakan melalui strategi pengembangan kawasan lindung dan budi daya melalui peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah yang diantaranya dengan menetapkan penyediaan ruang terbuka hijau.

Penyediaan ruang terbuka hijau yang juga merupakan amanat peraturan penataan ruang untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Makassar.

2. Peraturan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

Undang – undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari total luas wilayah, peraturan tersebut diatur dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka hijau.

Sebagai upaya pemenuhan proporsi RTH, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penghijauan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015.

1) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Penghijauan

Peraturan Daerah tentang penghijauan menjadi pedoman dalam penyediaan RTH di Kota Makassar karena mengatur ketentuan pengelolaan penanaman yang ditetapkan untuk dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta.⁶⁸ Aturan mengenai ruang terbuka hijau yang tertuang dalam Perda No 25 Tahun 1997 yakni mengenai kewajiban penyediaan RTH pada lahan pemukiman dan bangunan komersil seperti hotel, kantor, industri/pabrik, dan sebagainya. Kewajiban penyediaan tersebut antara lain meliputi :

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muharis Kepala Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pada tanggal 19 April 2012

a. Untuk pemukiman/perumahan

- 1) Jenis persil/kapling dengan ukuran kurang dari 120m² wajib ditanami tanaman hias/rumput yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- 2) Jenis persil/kapling dengan ukuran lebih dari 120m² sampai 240m² wajib ditanami minimal 1(satu) batang pohon pelindung dan tanaman hias/rumput yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Jenis persil/kapling dengan ukuran lebih dari 240m² wajib ditanami minimal 3(tiga) batang pohon pelindung dan tanaman hias/rumput yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Untuk Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik dan Bangunan sejenisnya wajib melaksanakan/menata lingkungan hijau/area penghijauan minimal 10% dari luas areal yang dimiliki.dikuasi secara sah.

2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Proses penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 antara lain meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar antara lain terdiri dari dari rencana zona publik akan yang dibuat hutan kota, taman kota, tempat rekreasi atau liburan, pemakaman jalur hijau tepian jalan atau median jalan, dan sementara untuk rencana zona privat yakni wilayah perumahan, perkantoran, pergudangan

Pemanfaatan RTH dilaksanakan melalui pelaksanaan program pemanfaatan tetap mengacu pada fungsi ruang dengan mengembangkan penatagunaan tanah, pendayagunaan air, penatagunaan udara, dan sumber daya lainnya.

Pengawasan dan Pengendalian ruang terbuka hijau dilaksanakan secara terpadu berkelanjutan, dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang, dengan menetapkan persyaratan pada permohonan izin mendirikan bangunan (IMB).

Dalam peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 3 menyebutkan ketentuan mengenai persyaratan perencanaan, penataan, dan pengelolaan RTH terkait penetapan syarat permohonan dalam IMB sebagai wujud pengawasan dan pengendalian RTH lebih lanjut diatur dalam peraturan walikota, namun kenyataannya sejauh ini belum ada dikeluarkan mengenai persyaratan yang dimaksud tersebut.⁶⁹

3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034.

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah mengatur mengenai perencanaan terkait penyediaan ruang terbuka hijau yang sebelumnya telah diatur dalam Perda mengenai RTH, beberapa aturan mengenai perencanaan penyediaan RTH diantaranya :

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Irma Kepala Pengembangan dan Penelitian Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang Fasum Fasos Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar pada tanggal 15 April 2016

Rencana pemenuhan RTH dalam wilayah kota, terdiri atas :

- a. RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun
- b. RTH pada kawasan kota yang belum terbangun; dan
- c. RTH pada kawasan reklamasi.

Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan luasan paling sedikit 2.900 ha (dua ribu sembilan ratus) hektar terdiri dari RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas daratan kawasan kota yang belum terbangun. ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan luasan paling sedikit 3.164 ha (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan

Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dengan presentase ruang terbuka hijau publik 20% dan ruang terbuka hijau privat 20% dari luas kawasan kota yang belum terbangun pada wilayah daratan.

RTH pada kawasan reklamasi meliputi RTH publik paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan reklamasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

TABEL 1

Rencana Pemenuhan RTH Kota Makassar Tahun 2034

| NO | Pembagian RTH | Presentase RTH Luas Wilayah Kota (%) | Presentase RTH Luas Wilayah Kawasan (%) | Luas RTH Paling Sedikit (Ha) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 1. | RTH PUBLIK | Paling Sedikit 20% | | |
| | a.kawasan kota yang sudah terbangun | | 10 | 967 |
| | b.kawasan kota yang belum terbangun | | 20 | 1.582 |
| | c.kawasan reklamasi | | 30 | 1.350 |
| 2. | RTH PRIVAT | Paling Sedikit 10% | | |
| | a.kawasan kota yang sudah terbangun | | 20 | 1.933 |
| | b.kawasan kota yang belum terbangun | | 20 | 1.582 |
| | c.kawasan reklamasi | | 20 | 900 |
| JUMLAH | | 30% | | 8.314 |

Sumber : Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015

B. Aspek yang Berpengaruh Pada Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar

Penataan ruang di Kota Makassar khususnya penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH masih jauh dari kebutuhan sebuah kota besar. Presentase RTH Kota Makassar yang diperoleh dari hasil identifikasi masih jauh dari kebutuhan RTH perkotaan sebesar 30% dari total luas wilayah yang diatur dalam peraturan penataan ruang.

Pasal 29 Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur mengenai penyediaan RTH yakni sebesar 30% antara lain terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Ruang terbuka hijau di perkotaan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem terhadap tingginya laju pembangunan yang lebih bersifat komersil, penyediaan ruang terbuka hijau juga dilakukan sebagai upaya mewujudkan infrastruktur hijau di wilayah perkotaan agar terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan serta menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan. Pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar sebagai mana yang telah diatur meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan/pengendalian.

Perencanaan dalam penyediaan ruang terbuka hijau dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah yakni dengan penyusunan

masterplan RTH Kota Makassar mengenai rencana potensi-potensi lahan yang dapat dijadikan RTH, wilayah potensi lahan tersebut berada pada masing-masing kawasan yang telah ditetapkan pada rencana tata ruang, rencana potensi lahan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang meliputi hutan kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, dan sebagainya.⁷⁰

Pemanfaatan RTH dilakukan dengan memanfaatkan potensi lahan yang sudah atau belum terbangun pemanfaatan lahan untuk RTH dilaksanakan antara lain melakukan penghijauan pada jalur jalan, taman, sempadan sungai, dengan penanaman pohon dan tanaman, selain itu penataan dan pemeliharaan area perkuburan juga dilakukan oleh dinas pertamanan dan kebersihan sebagai instansi dalam lingkup Pemerintahan Kota Makassar yang memiliki peran penting dalam pemanfaatan RTH.⁷¹

Pengawasan dan Pengendalian Ruang terbuka hijau dilakukan dengan mengacu pada peruntukan lahan serta partisipasi swasta dan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan melakukan identifikasi atau pendataan agar tidak terjadi perubahan fungsi pada lahan terbuka hijau selain itu juga sebagai upaya untuk mencegah penurunan kualitas dan kuantitas RTH pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dimaksud dilakukan oleh BLHD dan Dinas

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Makmun Staf Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar pada tanggal 15 april 2016

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muharis Kepala Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pada tanggal 19 April 2012

Pertamanan.⁷² Upaya pengawasan dan pengendalian juga dilakukan Dinas Tata Ruang Bangunan yakni dengan pengendalian lahan di wilayah perkotaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pengawasan terkait instrumen perizinan dalam proses pembangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi kawasan.

TABEL 2
RANGKUMAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MAKASSAR
TAHUN 2015

| NO | KECAMATAN | LUAS KECAMATAN (Ha) | LUAS RTH (Ha) | PERSENTASE (%) |
|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Biringkanaya | 3,163.81 | 269.14 | 1.53 |
| 2 | Bontoala | 147.58 | 6.31 | 0.04 |
| 3 | Makassar | 251.06 | 8.67 | 0.05 |
| 4 | Mamajang | 241.48 | 6.59 | 0.04 |
| 5 | Manggala | 2,302.23 | 75.80 | 0.43 |
| 6 | Mariso | 228.44 | 10.14 | 0.06 |
| 7 | Panakkukang | 1,414.17 | 249.33 | 1.42 |
| 8 | Rappocini | 1,207.32 | 25.04 | 0.14 |
| 9 | Tallo | 903.40 | 392.60 | 2.23 |
| 10 | Tamalanrea | 4,312.68 | 186.61 | 1.06 |
| 11 | Tamalate | 2,627.40 | 204.03 | 1.16 |
| 12 | Ujung Pandang | 282.64 | 15.89 | 0.09 |
| 13 | Ujung Tanah | 189.70 | 8.56 | 0.05 |
| 14 | Wajo | 204.11 | 1.94 | 0.01 |
| 15 | Kelurahan Sangkarrang | | 0,70 | 0,00 |
| Total | | 17,476.01 | 1,264.58 | 8,31 |

Sumber : BLHD Kota Makassar, 2016

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Makmun Staf Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar pada tanggal 15 april 2016

Table 1 di atas menunjukkan jumlah total luas RTH Kota Makassar tahun 2015 dengan perhitungan di masing – masing Kecamatan di Kota Makassar. Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari hasil penggabungan data luasan RTH Kota Makassar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2012 presentase RTH sebesar 6,716% dan pada tahun 2015 sebesar 8,31%.⁷³

TABEL 3
RUANG TERBUKA HIJAU EKSISTING (Ha) TAHUN 2015

| No | Ketersediaan RTH Eksisting (Ha) | Jumlah RTH Eksisting (Ha) |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | Hutan Kota | 125,64 |
| 2 | Jalur Hijau | 71,21 |
| 3 | Lapangan | 197,61 |
| 4 | Taman | 132,90 |
| 5 | Pemukaman | 100,02 |
| 6 | Bakau | 558,93 |
| 7 | Sempadan | 274,07 |
| TOTAL | | 1,462 |
| PRESENTASE % | | 8,31% |

Sumber : BLHD Kota Makassar, 2016

Tabel 2 menunjukkan besaran jumlah RTH Kota Makassar berdasarkan jenisnya antara lain berdasarkan fisiknya yang terdiri RTH Alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional dan RTH Non Alami/Binaan yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Makmun Staf Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar pada tanggal 15 april 2016

2. Aspek Berpengaruh Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

Dalam proses penataan dan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar banyak pihak yang memiliki peran di dalam pelaksanaannya yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam mengatur, menyediakan, memanfaatkan dan melaksanakan pengadaan ruang terbuka hijau.

Jumlah RTH Kota Makassar terus mengalami peningkatan meski demikian peningkatan jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan dan peraturan penyediaan ruang terbuka hijau.

TABEL 4

KEBUTUHAN DAN KEKURANGAN RTH KOTA MAKASSAR

| TOTAL | RTH Publik | RTH Privat | Luas M² |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Kebutuhan RTH | 34,952,019.06 | 17,476,009.53 | 52,428,028.59 |
| Kekurangan RTH | 24,536,329.09 | 15,245,912.26 | 39,782,241.35 |

Sumber : BLHD Kota Makassar, 2016

Upaya untuk memenuhi kebutuhan RTH di Kota Makassar terus dilaksanakan dengan didukung dengan beberapa aspek dalam pelaksanaannya diantaranya kebijakan penataann ruang, program penghijaun, dan inventarisasi, meski demikian juga terdapat aspek penghambat dalam pelaksanaannya.

1. Pendukung

Beberapa Aspek yang mendukung Penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar yakni kebijakan penataan ruang, program penghijauan, inventarisasi ruang terbuka hijau.

a) Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang menjadi pendukung dalam penyediaan RTH karena dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan termasuk kawasan penghijauan seperti RTH, harapannya kebutuhan lahan untuk memenuhi proporsi RTH dapat terpenuhi.⁷⁴ Penataan ruang juga mengatur pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan penggunaan lahan di Kota Makassar, salah satu upayanya ialah pengendalian fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya.

GAMBAR 2

Penertiban Lahan Untuk Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau



Sumber: pojoksulsel.com, 2016

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Makmun Staf Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar pada tanggal 15 april 2016

Kepala Seksi Pengembangan dan Penelitian Bagian Penataan, Pemanfaatan Ruang Fasum Fاسos Dinas Tata Ruang bahwa bentuk pengendalian yang dilakukan misalnya menghimbau dalam proses pengurusan izin membangun para pengembang agar menyediakan lahan untuk RTH pada lokasi pembangunan karena regulasi mengenai itu telah ada, kemudian bentuk pengendalian lain juga dengan penertiban lokasi atau kawasan yang peruntukannya tidak sesuai aturan dalam RTRW misalnya lokasi berdagang pedagang kaki lima.⁷⁵

GAMBAR 3

Pemanfaatan Lahan Penertiban Bangunan Untuk Menambah Proporsi Ruang Terbuka Hijau



Sumber : pojoksulsel.com, 2016

b) Program Penghijauan

Program penghijauan oleh Pemerintah Kota Makassar dapat menjadi upaya dalam mendukung pemenuhan RTH, program penghijauan juga mampu meningkatkan partisipasi swasta untuk ikut serta membantu

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Irma Kepala Pengembangan dan Penelitian Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang Fasum Fاسos Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar pada tanggal 15 April 2016

memenuhi kekurangan RTH karena melibatkan masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah dalam pelaksanaan.

Beberapa program penghijauan untuk menambah proporsi RTH di Kota Makassar diantaranya RTH Lorong Garden dan pemanfaatan Vertikal Garden.

RTH lorong garden merupakan program unggulan kota makassar yang dilakukan dengan pemanfaatan lorong pemukiman menjadi ruang terbuka hijau dengan berbagai kreasi masyarakat. Lorong garden dikembangkan untuk membantu menambah proporsi RTH dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Salah satu lorong yang sukses melakukan penghijaaun dan merupakan percontohan berada di Kelurahan Kassi – Kassi.⁷⁶

GAMBAR 4

Lorong Garden Percontohan di Kelurahan Kassi - Kassi



Sumber : makassarterkini.com, 2016

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muharis Kepala Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pada tanggal 19 April 2012

Program RTH Lorong garden oleh Pemerintah Kota Makassar selanjutnya direncanakan akan berfokus di kelurahan mariso. RTH Lorong garden tidak lepas dari upaya pemerintah dan masyarakat setempat dalam penghijauan kota sebagai wujud pemenuhan RTH.

c) Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau

Melakukan pendataan mengenai ketersediaan RTH menjadi upaya dalam mendukung pemenuhan ruang terbuka hijau karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH.

Inventarisasi rutin merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat banyaknya alih fungsi lahan yang mengorbankan RTH, dengan adanya pendataan yang jelas maka jaminan terhadap keberadaan dan pengelolaan RTH dapat dilakukan dengan maksimal tanpa harus mengorbankan keberadaannya untuk pembangunan yang bersifat komersil misalnya lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW agar dilakukan penataan sehingga dapat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Upaya ini juga dapat membantu mewujudkan penataan ruang yang efektif, partisipatif dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

2. Penghambat

Besaran jumlah RTH Kota Makassar belum mencukupi kebutuhan sebuah kota besar hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan dalam penyediaanya, antara lain

1. Ketersediaan Lahan

Terbatasnya lahan di Kota Makassar akibat tingginya laju pembangunan merupakan salah satu penghambat dalam penyediaan RTH Kota Makassar, lebih lanjut dikemukakan Bapak Makmun Staf Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dalam wawancara di kantor BLHD Kota Makassar bahwa salah satu kendala pemenuhan RTH saat ini ialah kurangnya lahan yang akan dibuat RTH, kendala tersebut juga didukung dengan semakin tingginya harga tanah di Makassar, oleh sebabnya pelaksanaan penyediaan RTH lebih terfokus terhadap kawasan yang sudah terbangun.⁷⁷

2. Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Dalam penyediaan RTH tidak hanya membutuhkan peran pemerintah namun juga dibutuhkan peran dari pihak swasta dan masyarakat, kurangnya perhatian dari masyarakat dan swasta dapat dilihat dari lebih banyaknya masyarakat dan pihak pengembang yang cenderung memanfaatkan lahan dengan pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Bangunan hotel di Kota Makassar misalnya, beberapa hotel mewah di Makassar cenderung tidak menyisihkan lahannya untuk penghijauan dalam bentuk RTH.⁷⁸ Peraturan mengenai Penyediaan ruang terbuka atau lahan untuk dilakukan penghijauan pada

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Makmun Staf Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar pada tanggal 15 april 2016

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Irma Kepala Pengembangan dan Penelitian Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang Fasum Fasos Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar pada tanggal 15 April 2016

bangunan komersil di kota Makassar telah lama diatur bahkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, yakni dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Penghijauan.

3. Alih Fungsi Lahan

Salah satu penghambat dalam penyediaan RTH yakni adanya alih fungsi lahan. Terjadinya alih fungsi lahan fasilitas umum berupa taman di Kota Makassar seolah merupakan hal yang biasa hal tersebut didukung dengan banyaknya kasus perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kota Makassar.

Kejadian alih fungsi lahan yang sering terjadi ialah adanya lahan RTH di kawasan perumahan sebagai bagian dari sarana, prasarana, dan utilitas namun kemudian beralih fungsi menjadi unit unit rumah, hal tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Pada Kawasan Industri Perdagangan Perumahan dan Pemukiman yang mana umumnya pengembang dalam membangun perumahan harus mengikuti ketentuan perbandingan 70:30, dimana 30% tersebut ialah untuk sarana, prasarana, dan utilitas termaksud RTH.⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Irma Kepala Pengembangan dan Penelitian Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang Fasum Fasos Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar pada tanggal 15 April 2016

TABEL 5**Perubahan RTH Kota Makassar**

| RTH yang dikelola Pemerintah Kota Makassar | Lokasi | Perubahan yang terjadi |
|---|---|--|
| Taman Lingkungan | Taman Pualam di Jalan Penghibur | Sebagian lahannya dibangun pos polisi pariwisata |
| | Taman Sudiang | Berubah jadi Tol |
| | Jalur Hijau A.P Pettarani | Sebagian jalur hijau digunakan untuk pelebaran |
| | Jalur Hijau Jalan Veteran | Sebagian jalur hijau digunakan untuk pelebaran |
| Jalur Hijau Taman atau Bundaran | Bundaran di Jalan Hos Cokrominoto | Dibangun pos polisi |
| | Jalur Tengah Jalan Urip Sumoharjo (sekitar jembatan penyebrangan Maccini) | Bagian atas jalur hijau dipasang pagar |
| | Jalur Hijau Arief Rate | Sebagian lahannya menjadi area parkir |

Sumber : **BLHD Kota Makassar, 2016**

Tabel 5 menunjukkan adanya alih fungsi lahan RTH yang terjadi di Kota Makassar, setiap tahunnya alih fungsi lahan di Kota Makassar terus terjadi hal tersebut didukung dengan adanya fakta di lapangan diantaranya perubahan fasilitas umum berupa taman di Kota Makassar seperti taman tello dan taman segitiga pualam.

Taman tello merupakan RTH yang saat ini telah berubah wajah menjadi bangunan komersil. Lahan seluas lebih 2175 meter persegi yang terletak di Tello Jalan Urip Sumoharjo, dahulu lahan tersebut merupakan taman yang terdaftar sebagai aset Pemerintah Kota namun ada oknum yang mengatakan tanah tersebut ialah tanah milik mereka, menurut informasi lahan tersebut akan dibangun showroom mobil, sementara ini pemerintah melakukan penelusuran terkait kasus tersebut.⁸⁰

GAMBAR 5

Pembangunan di Lahan RTH



Sumber : tribunnews.com, 2016

Pengalihan fungsi lahan RTH lainnya yang terjadi di Kota Makassar ialah kasus taman segitia pualam yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan hotel.⁸¹

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Makmun Staf Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar pada tanggal 15 april 2016

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Muharis Kepala Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pada tanggal 19 April 2012

GAMBAR 6

Pembangunan di Taman yang Merupakan Lahan RTH



Sumber : beritakotamakassar.com, 2016

Alih fungsi lahan segitiga pualam merupakan satu dari beberapa kasus pengalihan lahan yang banyak dibicarakan masyarakat. Dalam wawancara dengan media antara sulsel pihak kejati yang menangani kasus alih fungsi lahan tersebut, yang diwakili oleh Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noor Adi, menyebutkan kasus pualam masih dalam proses penyelidikan yakni pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan.⁸²

⁸² <http://m.antarasulsel.com/berita/66996/kejati-jadwal-ulang-pemanggilan-kepala-bpn-makassar>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai penyediaan RTH di Kota Makassar antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penghijauan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.
2. Total luas RTH di Kota Makassar ialah 8,31% ini berarti belum mencukupi kebutuhan RTH yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam pelaksanaan penyediaan RTH Kota Makassar beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan penghambat. Aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dalam mengatur penyediaan dan penataan RTH, program penghijauan seperti lorong *garden* dan *vertikal garden*, serta inventarisasi RTH sebagai pendukung penyediaan RTH karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH. Sementara untuk aspek penghambat yang mempengaruhi penyediaan RTH meliputi minimnya ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah

1. Kebijakan penyediaan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah diharapkan dapat mampu menjadi pedoman untuk memenuhi kebutuhan RTH Kota Makassar baik Publik maupun Privat agar sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Pesatnya kegiatan pembangunan dapat mengancam ketersediaan RTH Kota Makassar oleh karena itu perlu kiranya fungsi kontrol dan pengawasan yang dimiliki dinas terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk dijalankan dengan lebih intensif agar dapat menjamin keberadaan RTH yang telah atau akan dibangun, kenyataan tersebut dapat juga menjadi acuan untuk masyarakat, dan swasta agar lebih berpartisipasi penyediaan RTH dan mengupayakan penyediaan RTH agar mencukupi kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M.Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana, Jakarta, 2014
- A.M.Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Penerbit Arus Timur, Makassar, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Jakarta, 2008.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Irwansyah, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Rajawali Pers, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2001.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon dan Kawan-kawan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Syahrul Machmud, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penghijauan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005 – 2015

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.

Website

<http://makassar.radiosmartfm.com/jurnal-makassar/4391-ruang-terbuka-hijau-makassar-dibawah-standart-minimal.html> diakses tanggal 5 desember 2015

<http://print.kompas.com/baca/2016/02/11/Ruang-Hijau-Kurang-Picu-Masalah-Kota> diakses tanggal 12 februari 2016

<http://m.antarasulsel.com/berita/66996/kejati-jadwal-ulang-pemanggilan-kepala-bpn-makassar> di akses tanggal 1 Mei 2016

m.voaindonesia.com/a/penerapan-kebijakan-ruang-terbuka-hijau-rth-di-indonesia-minim/1521006.html diakses tanggal 1 Mei 2016

pojoksulsel.com

makassarterkini.com

tribuntimurnews.com

beritakotamakassar.com

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 Tlp. (0411) 438381 Makassar 90144



SURAT KETERANGAN

Nomor : 660.51/gg/BLHD/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra.Hj. SITTI SAMSI AH,MM.
NIP : 19610717 198101 2 002
Pangkat : Penata Tingkat I
Jabatan : Kepala Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Menerangkan bahwa Mahasiswa Hukum UNHAS sebagai berikut:

Nama : Nopitasari Superjo
NIM : B 121 121 35
Program studi : Hukum Administrasi Negara

Benar telah mengambil data dan melakukan wawancara dalam proses penelitian skripsi dengan judul **"Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar."**

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenar-benarnya kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN,
Kabid. Pemulihan Kerusakan
Lingkungan dan KSDA



[Signature]
Dra.Hj. SITTI SAMSI AH,MM.
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP. 19610717 198101 2 002



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN**

Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Makassar
Telp. +62411 - 435550 Fax. +62411 - 436567
Email : dtrb@makassarkota.go.id Home Page : <http://dtrb.makassarkota.go.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 049/466/DTRB/W/2016

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : **SUKRI HASANUDDIN, SE., M.Si.**
NIP : **19620112 198901 1 001**
Pangkat / Golongan : **Pembina Tingkat I / IV.b**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar**
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama : **NOPITASARI SUPARJO**
Nim/Jurusan : **B12112135 / Hukum Administrasi Negara**
Instansi / Pekerjaan : **Mahasiswa**
Judul : **ASPEK HUKUM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM**

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR

Benar telah Melakukan penelitian pada Kantor Dinas tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar terhitung mulai tanggal 01 s/d 25 April 2016

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 April 2016



SUKRI HASANUDDIN, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19620112 198901 1 001



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 Telp. (0411) 457001
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/392 /DPK/IV/2016

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SAENAL ABIDIN, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
Alamat : Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NOPITASARI SUPARJO**
NIM / Jurusan : B12112135 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Judul : **" ASPEK HUKUM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR "**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dari Tanggal 01 s/d 19 April 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 April 2016


**An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS**
Drs. SAENAL ABIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP . 19630401 198503 1 019

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
3. Peringgal.

DAFTAR IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MAKASSAR

| TAMAN KOTA | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|
| No | Nama RTH | Lokasi/Kecamatan | Luas (m) ² |
| 1 | Taman Patung Ayam Daya | Biringkanaya | 3650 |
| 2 | Taman KIK Daya | Biringkanaya | 180 |
| 3 | Taman Wijaya Kusuma | Rappocini | 960 |
| 4 | Taman Bundaran Pelita | Rappocini | 505 |
| 5 | Taman Minasa Upa | Rappocini | |
| 6 | Taman UNM | Rappocini | 1,650 |
| 7 | Taman Monumen Emmy Saelan | Rappocini | 3,084 |
| 8 | Taman Emmy Saelan | Rappocini | 1,189 |
| 9 | Taman Tello Baru | Panakkukang | 2,175 |
| 10 | Taman Gedung Keuangan | Panakkukang | 1,700 |
| 11 | Taman Depan Kantor Gubernur | Panakkukang | 3,465 |
| 12 | Taman Ade Irma Suryani | Tallo | 600 |
| 13 | Taman Monumen 40.000 Jiwa | Tallo | 4,670 |
| 14 | Taman Jl. Langgau/Monumen Korban 40.000 Jiwa | Tallo | 7,000 |
| 15 | Taman Jl. Sinassara Kel. Kaluku Bodoa | Tallo | 250 |
| 16 | Taman Kerung-Kerung | Makassar | 330 |
| 17 | Taman Kumala | Tamalate | 150 |
| 18 | Taman Perbatasan MalengkeriTamalate | Tamalate | 2,272 |
| 19 | Taman Nusakambangan | Ujung Pandang | 230 |
| 20 | Taman Macan | Ujung Pandang | 11,000 |
| 21 | Taman Slamet Riyadi | Ujung Pandang | 1,330 |
| 22 | Taman Benteng | Ujung Pandang | 6,935 |
| 23 | Taman Kantor Balaikota | Ujung Pandang | 7,990 |
| 24 | Taman Pattimura | Ujung Pandang | 2,300 |
| 25 | Taman Hasanuddin | Ujung Pandang | 6,505 |
| 26 | Taman Safari/Pantai Laguna | Ujung Pandang | 3,200 |
| 27 | Taman Pualam/Losari | Ujung Pandang | 3,175 |
| 28 | Taman Pantai Gapura | Ujung Pandang | 2,299 |
| 29 | Taman Karunrung | Ujung Pandang | 3,430 |
| 30 | Taman Rumah Jabatan Walikota | Ujung Pandang | 4,990 |
| 31 | Taman Sudirman | Ujung Pandang | 11,875 |
| 32 | Taman Pasar Baru | Ujung Pandang | 15,000 |
| 33 | Taman Maccini | Bontoala | 3,400 |

| | | | |
|----|-------------------------------|---------------|-------|
| 34 | Taman Al-Markaz | Bontoala | 240 |
| 35 | Taman Kakatua | Mamajang | 1,230 |
| 36 | Taman Kerung-Kerung | Makassar | 330 |
| 37 | Taman Gedung PKK | Panakkukang | |
| 38 | Taman Bundaran Pasar Sentral | Ujung Pandang | 50 |
| 39 | Taman Bundaran Pa'Baeng-baeng | Rappocini | 50 |

| LAPANGAN | | | |
|----------|---|------------------|-----------------------|
| No | Nama RTH | Lokasi/Kecamatan | Luas (m) ² |
| 1 | Lapangan Hertasning | Rappocini | 12,000 |
| 2 | Lapangan Hasanuddin | Ujung Pandang | 19,500 |
| 3 | Lapangan Karebosi | Ujung Pandang | 73,000 |
| 4 | Lapangan samping Kantor Kel. Sudiang | Biringkanaya | 15,000 |
| 5 | Lapangan Perum. Pepabri Kel. Sudiang | Biringkanaya | 8,000 |
| 6 | Lapangan BPS Kel. Sudiang | Biringkanaya | 5,000 |
| 7 | Lapangan Perumnas RW 14 Blok M Kel. Sudiang Raya | Biringkanaya | 5,000 |
| 8 | Lap. Dwi Dharma Jl. SMP 25 RW 4 Kel. Sudiang Raya Biringkanaya | Biringkanaya | 5,000 |
| 9 | Lapangan perum. Telkom Kel. PaccerakangBiringkanaya | Biringkanaya | 20,000 |
| 10 | Lapangan Perum. BTP Kel. PaccerakangBiringkanaya | Biringkanaya | 50,000 |
| 11 | Lapangan Mangga III Kel. PaccerakangBiringkanaya | Biringkanaya | 20,000 |
| 12 | Lapangan Yayasan Perum Gubernur RW I Kel. PaccerakangBiringkanaya | Biringkanaya | 10,000 |
| 13 | Lapangan AURI Kel. PaccerakangBiringkanaya | Biringkanaya | 10,000 |
| 14 | Lapangan Kumalasari Kel. PaccerakangBiringkanaya | Biringkanaya | 10,000 |
| 15 | Lapangan Daya Indah Persada RW 17 Kel. PaccerakangBiringkanaya | Biringkanaya | 10,000 |
| 16 | Lapangan Daya Indah Persada RW 6 Berua Kel. PaccerakangBiringkanaya | Biringkanaya | 50,000 |
| 17 | Lapangan SMU 15 Kel. BulurokengBiringkanaya | Biringkanaya | 10,000 |
| 18 | Bumi Perkemahan Caddika Kel. BulurokengBiringkanaya | Biringkanaya | 80,000 |
| 19 | Lapangan AURI Daya Kel. DayaBiringkanaya | Biringkanaya | 10,000 |
| 20 | Lapangan POLDA Kel. PaiBiringkanaya | Biringkanaya | 10,000 |
| 21 | Lapangan Tembak Kel. PaiBiringkanaya | Biringkanaya | 10,000 |
| 22 | Lapangan Taman Sudiang Indah Kel. PaiBiringkanaya | Biringkanaya | 5,000 |
| 23 | Lapangan Golf Baddoka Kel. PaiBiringkanaya | Biringkanaya | 100,000 |

| | | | |
|----|--|-------------|---------|
| 24 | Lapangan Bola Talla Limampuloo | Tamalanrea | 20,000 |
| 25 | Lapangan Perdos UNHAS (Lap. Bola) | Tamalanrea | 10,000 |
| 26 | Lapangan Bung Tamalanrea Jaya | Tamalanrea | 3,000 |
| 27 | Lapangan UNHAS | Tamalanrea | 10,000 |
| 28 | Lapangan Kavaleri | Tamalanrea | 10,000 |
| 29 | Lapangan Biring Romang Kapasa | Tamalanrea | 1,300 |
| 30 | Lapangan BTN TNI Kapasa | Tamalanrea | 1,500 |
| 31 | Lapangan Kapasa | Tamalanrea | 5,000 |
| 32 | Lapangan Kapasa Nurul Amin | Tamalanrea | 1,700 |
| 33 | Lapangan Depan Kantor Lurah Antang | Manggala | 10,000 |
| 34 | Lapangan Bukit Baruga Antang | Manggala | 30,000 |
| 35 | Lapangan Kantor Camat Manggala | Manggala | 10,000 |
| 36 | Lapangan Kompleks Pemda | Manggala | 50,000 |
| 37 | Danau Balang Tonjong | Manggala | 370,000 |
| 38 | Lapangan Golf Kodam | Panakkukang | 40,000 |
| 39 | Lapangan Perumahan AU | Panakkukang | 10,000 |
| 40 | Lapangan UMI | Panakkukang | 50,000 |
| 41 | Lapangan BPN Batua Kelurahan Panaikang | Panakkukang | 20,000 |
| 42 | Lapangan Voli AL | Wajo | 200 |
| 43 | Lapangan Jl. Dg. Tantu | Tallo | 1,500 |
| 44 | Lapangan Jl. Muh Jufri | Tallo | 150 |
| 45 | Lapangan Unhas Kelurahan Lembo | Tallo | 4,725 |
| 46 | Lapangan Jalan Sunu Raya | Tallo | 450 |
| 47 | Lapangan Pattukangan 1 | Tamalate | 12,000 |
| 48 | Lapangan Pattukangan 2 | | 20,000 |
| 49 | Lapangan Kompleks BI Alauddin | | 600 |
| 50 | Lapangan UIN Alauddin Mangasa | | 600 |
| 51 | Lapangan Kompleks TVRI Malengkeri | | 800 |
| 52 | Lapangan Kompleks Graha Malengkeri | | 2,542 |

| PEMAKAMAN | | | |
|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| No | Nama RTH | Lokasi/Kecamatan | Luas (m) ² |
| 1 | Pemakaman Islam Sudiang | Biringkanaya | 60,000 |
| 2 | Pemakaman Kristen Pannara | Manggala | 34,570 |

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------|--------|
| 3 | Pemakaman Kristen Manggala | Manggala | 38,576 |
| 4 | Pemakaman Islam Panaikang | Panakukang | 58,500 |
| 5 | Pemakaman Kristen Panaikang | Panakukang | 51,500 |
| 6 | Pemakaman Islam Boroanging | Bontoala | 45,976 |
| 7 | Pemakaman Islam Maccini | Bontoala | 17,343 |
| 8 | Pemakaman Islam Dadi | Mamajang | 33,148 |
| 9 | Pemakaman Islam Sudiang | Biringkanaya | 60,000 |
| 10 | Pemakaman Jl. Patene | Biringkanaya | 20,000 |
| 11 | Pemakaman Jl. Pai | Biringkanaya | 5,000 |
| 12 | Pemakaman Manuruki Pajayyang | Biringkanaya | 5,000 |
| 13 | Pemakaman Poros Perumas Sudiang | Biringkanaya | 1,000 |
| 14 | Pemakaman BTN Sarana Indah | Biringkanaya | 1,000 |
| 15 | Pemakaman KNPI | Biringkanaya | 5,000 |
| 16 | Pemakaman Paccerakang 1 | Biringkanaya | 10,000 |
| 17 | Pemakaman Paccerakang 2 | Biringkanaya | 20,000 |
| 18 | Pemakaman Paccerakang 3 | Biringkanaya | 10,000 |
| 19 | Pemakaman Paccerakang 4 | Biringkanaya | 10,000 |
| 20 | Pemakaman Paccerakang 5 | Biringkanaya | 10,000 |
| 21 | Pemakaman Paccerakang 6 | Biringkanaya | 10,000 |
| 22 | Pemakaman Paccerakang 7 | Biringkanaya | 10,000 |
| 23 | Pemakaman Paccerakang 8 | Biringkanaya | 10,000 |
| 24 | Pemakaman Caddika Bulurokeng | Biringkanaya | 16,000 |
| 25 | Pemakaman Barangdadi Bulurokeng | Biringkanaya | 10,000 |
| 26 | Pemakaman Lera Bulurokeng | Biringkanaya | 10,000 |
| 27 | Pemakaman Biring Romang Daya | Biringkanaya | 4,000 |
| 28 | Pemakaman Belakang Poldo | Biringkanaya | 20,000 |
| 29 | Pemakaman Karang Tubun | Biringkanaya | 5,000 |
| 30 | Pemakaman Bonto Ramba | Biringkanaya | 5,000 |
| 31 | Pemakaman Tambasa | Biringkanaya | 6,000 |
| 32 | Pemakaman Perintis Kemerdekaan 6 | Biringkanaya | 1,000 |
| 33 | Pemakaman Jl. Politeknik Unhas | Biringkanaya | 1,000 |
| 34 | Pemakaman Kapasa | Biringkanaya | 27,500 |
| 35 | Pemakaman Biring Romang Kapasa | Biringkanaya | 7,500 |
| 36 | Pemakaman Sangalinna | Biringkanaya | 3,000 |
| 37 | Pemakaman Mattoanging | Biringkanaya | 5,000 |
| 38 | Pemakaman Tamala'lang | Biringkanaya | 5,000 |
| 39 | Pemakaman Parang Loe | Biringkanaya | 6,000 |
| 40 | Pemakaman Bira Selatan | Biringkanaya | 1,700 |
| 41 | Pemakaman Kristen Pannara | Biringkanaya | 34,570 |
| 42 | Pemakaman Kristen Manggala | Biringkanaya | 38,576 |

| | | | |
|----|--|----------|--------|
| 43 | Pemakaman Tionghoa Pannara | Manggala | 27,942 |
| 44 | Pemakaman Islam Antang | Manggala | 10,000 |
| 45 | Pemakaman Keluarga Selayar | Manggala | 5,000 |
| 46 | Pemakaman Jl. Ujung Bori Lama | Manggala | 5,000 |
| 47 | Pemakaman Makkio Baji | Manggala | 10,000 |
| 48 | Pemakaman Dekat Kompleks Unhas, Bangkala | Manggala | 5,000 |
| 49 | Pemakaman Ujung Bori | Manggala | 5,000 |
| 50 | Pemakaman Jl. Nipa-nipa 1 | Manggala | 10,000 |
| 51 | Pemakaman Jl. Nipa-nipa 2 | Manggala | 5,000 |
| 52 | Pemakaman Belakang Masjid Tamangapa | Manggala | 10,000 |
| 53 | Pemakaman Jl. Tamangapa Raya | Manggala | 10,000 |
| 54 | Pemakaman Raja Ngilu Jl. Kande | Bontoala | 1,500 |
| 55 | Pemakaman Arab Kande | Bontoala | 11,900 |
| 56 | Pemakaman Jl. Haji Mustafa Rappokalling | Tallo | 2,000 |
| 57 | Pemakaman Sultan Abdullah | Tallo | 2,760 |
| 58 | Pemakaman Kel. Rappojawa | Tallo | 90 |
| 59 | Pemakaman Jl. Tinumbu | Tallo | 6,477 |
| 60 | Pemakaman Barukang Raya | Tallo | 621 |
| 61 | Pemakaman Jl. Sunu II | Tallo | 400 |
| 62 | Pemakaman Jl. Gontang Kel. Tanjung Merdeka | Tamalate | 1,000 |
| 63 | Pemakaman Jl. Gontang Barat Kel. Tanjung Merdeka | Tamalate | 800 |
| 64 | Pemakaman Bayang Kel. Tanjung Merdeka | Tamalate | 3,000 |
| 65 | Pemakaman Barombong Kel. Tanjung Merdeka | Tamalate | 2,000 |
| 66 | Pemakaman Bungaya Kel. Barombong | Tamalate | 2,500 |
| 67 | Pemakaman BT. Kapetta Kel. Barombong | Tamalate | 3,000 |
| 68 | Pemakaman Bontoa Kel. Barombong | Tamalate | 1,000 |
| 69 | Pemakaman Kaccia 1 Kel. Barombong | Tamalate | 500 |
| 70 | Pemakaman Kaccia 2 Kel. Barombong | Tamalate | 2,000 |
| 71 | Pemakaman TP. Sappa Kel. Barombong | Tamalate | 1,000 |
| 72 | Pemakaman Sumanna Kel. Barombong | Tamalate | 2,500 |
| 73 | Pemakaman Timbuseng 1 Kel. Barombong | Tamalate | 1,000 |
| 74 | Pemakaman Timbuseng 2 Kel. Barombong | Tamalate | 2,500 |
| 75 | Pemakaman Pa'lannassang Kel. Barombong | Tamalate | 2,000 |
| 76 | Pemakaman Jl. Mannuruki 2 Kel. Mangasa | Tamalate | 800 |
| 77 | Pemakaman Sultan Alauddin 3 Kel. Mangasa | Tamalate | 850 |
| 78 | Pemakaman Bonto Je'ne BTN Hartaco | Tamalate | 2,500 |
| 79 | Pemakaman Cambayya Kel. Parang Tambung | Tamalate | 1,500 |
| 80 | Pemakaman Tamaddoeng Jl. Daeng Tata III | Tamalate | 3,000 |

| | | | |
|----|--|----------|-------|
| 81 | Pemakaman Jl. Dangko 1 | Tamalate | 1,500 |
| 82 | Pemakaman Jl. Dangko 2 | Tamalate | 1,000 |
| 83 | Pemakaman BTN Hartaco Kel. Balang Baru | Tamalate | 1,000 |
| 84 | Pemakaman Jl. Andi Tonro 1 | Tamalate | 7,500 |
| 85 | Pemakaman Jl. Andi Tonro 2 | Tamalate | 7,500 |

| JALUR TENGAH | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| No. | Nama RTH | Lokasi/Kecamatan | Luas (m) ² |
| 1 | Jl. Perintis Kemerdekaan | Tamalanrea | 8,831 |
| 2 | Jl. BTP Raya | Tamalanrea | 15,109 |
| 3 | Jl. Antang Raya | Manggala | 3,600 |
| 4 | Jl. Dr. Leimena | Manggala | 6,480 |
| 5 | Jl. Borong Raya | Manggala | 4,410 |
| 6 | Jl. Batua Raya | Manggala | 1,950 |
| 7 | Jl. Raya Baruga | Panakkukang | 1,500 |
| 8 | Jl. Inspeksi PAM | Manggala | 3,812 |
| 9 | Jl. Nipa-nipa | Manggala | 1,461 |
| 10 | Jl. Perumnas Antang | Manggala | 4,849 |
| 11 | Jl. Tamangapa Raya | Manggala | 5,046 |
| 12 | Jl. Ujung Bori Lama | Manggala | 750 |
| 13 | Jl. AP. Pettarani | Rappocini | 22,877 |
| 14 | Jl. Tallasalapang | Rappocini | 3,000 |
| 15 | Jl. Sultan Alauddin | Rappocini | 10,330 |
| 16 | Jl. Bonto Langkasa | Rappocini | 375 |
| 17 | Jl. Bonto Manai | Rappocini | 528 |
| 18 | Jl. Hertasning | Rappocini | 9,132 |
| 19 | Jl. R.S Faisal | Rappocini | 225 |
| 20 | Jl. Toddopuli Raya | Rappocini | 744 |
| 21 | Jl. Toddopuli Raya Timur | Rappocini | 1,269 |
| 22 | Jl. Nikel | Rappocini | 1,950 |
| 23 | Jl. Arupala | Rappocini | 5,700 |
| 24 | Jl. Kompleks IKIP | Rappocini | |
| 25 | Jl. Abdullah Dg. Sirua | Panakkukang | 7,827 |
| 26 | Jl. Urip Sumoharjo | Panakkukang | 12,071 |
| 27 | Jl. Racing Center | Panakkukang | 4,162 |
| 28 | Jl. Adhiyaksa Baru | Panakkukang | 702 |
| 29 | Jl. Adhiyaksa Lama | Panakkukang | 471 |
| 30 | Jl. Pettarani II | Panakkukang | 648 |

| | | | |
|----|--------------------------|---------------|--------|
| 31 | Jl. Boulevard | Panakkukang | 1,734 |
| 32 | Jl. Pengayoman | Panakkukang | 2,148 |
| 33 | Jl. Ade Irma | Bontoala | 461 |
| 34 | Jl. Arief Rahman Hakim | Bontoala | 987 |
| 35 | Jl. Gatot Subroto | Bontoala | 952 |
| 36 | Jl. Ir. Juanda | Bontoala | 417 |
| 37 | Jl. Pongtiku | Bontoala | 2,371 |
| 38 | Jl. Ujung Pandang Baru | Bontoala | 600 |
| 39 | Jl. Nusantara | Ujung Pandang | 700 |
| 40 | Jl. Yos Sudarso | Ujung Pandang | 747 |
| 41 | Jl. G. Latimojong | Makassar | 2,570 |
| 42 | Jl. G. Bawakaraeng | Makassar | 673 |
| 43 | Jl. Urip Sumoharjo | Makassar | 12,071 |
| 44 | Jl. Veteran | Makassar | 5,291 |
| 45 | Jl. Abu Bakar Lambogo | Makassar | 1,041 |
| 46 | Jl. Bulukunyi | Makassar | 142 |
| 47 | Jl. G. Salahutu | Makassar | 275 |
| 48 | Jl. Kerung-kerung | Makassar | 587 |
| 49 | Jl. Maccini Raya | Makassar | 359 |
| 50 | Jl. Monginsidi | Makassar | 2,606 |
| 51 | Jl. Sungai Saddang Baru | Makassar | 2,290 |
| 52 | Jl. Sungai Saddang Lama | Makassar | 1,052 |
| 53 | Jl. A. Mappanyukki | Mariso | 2,318 |
| 54 | Jl. KS Tubun | Mariso | 799 |
| 55 | Jl. Nuri | Mariso | 1,197 |
| 56 | Jl. Nusa Indah | Mariso | 401 |
| 57 | Jl. Rajawali | Mariso | 251 |
| 58 | Jl. A. Mangerangi | Tamalate | 966 |
| 59 | Jl. A. Tonro | Tamalate | 2,703 |
| 60 | Jl. Abdul Kadir | Tamalate | 975 |
| 61 | Jl. Daeng Tata | Tamalate | 2,456 |
| 62 | Jl. Kumala | Tamalate | 2,138 |
| 63 | Jl. Malengkeri | Tamalate | 2,348 |
| 64 | Jl. Mallombassarang | Tamalate | 1,313 |
| 65 | Jl. Manuruki | Tamalate | 653 |
| 66 | Jl. Tentara Pelajar | Wajo | 1,015 |
| 67 | Jl. HOS. Cokroaminoto | Wajo | 180 |
| 68 | Jl. Diponegoro | Wajo | 695 |
| 69 | Jl. Wahidin Sudirohusodo | Wajo | 300 |
| 70 | Jl. Tentara Pelajar | Wajo | 2,029 |

| | | | |
|-----|-----------------------|---------------|--------|
| 71 | Jl. HOS. Cokroaminoto | Wajo | 750 |
| 72 | Jl. Sudirman | Ujung Pandang | 3,615 |
| 73 | Jl. Ahmad Yani | Ujung Pandang | 1,035 |
| 74 | Jl. Arief Rate | Ujung Pandang | 975 |
| 75 | Jl. Bontolempangan | Ujung Pandang | 2,652 |
| 76 | Jl. Bulusaraung | Ujung Pandang | 742 |
| 77 | Jl. Chairil Anwar | Ujung Pandang | 1,207 |
| 78 | Jl. DR. Ratulangi | Ujung Pandang | 7,001 |
| 79 | Jl. G. Merapi | Ujung Pandang | 2,190 |
| 80 | Jl. H. Bau | Ujung Pandang | 1,726 |
| 81 | Jl. Kajaolalido | Ujung Pandang | 1,083 |
| 82 | Jl. Karunrung | Ujung Pandang | 564 |
| 83 | Jl. Lagaligo | Ujung Pandang | 152 |
| 84 | Jl. Lasinrang | Ujung Pandang | 321 |
| 85 | Jl. Pasar Ikan | Ujung Pandang | 70 |
| 86 | Jl. Pattimura | Ujung Pandang | 727 |
| 87 | Jl. Penghibur | Ujung Pandang | 744 |
| 88 | Jl. Riburane | Ujung Pandang | 696 |
| 89 | Jl. Sungai Tangka | Ujung Pandang | 2,700 |
| 90 | Jl. Slamet Riyadi | Ujung Pandang | 980 |
| 91 | Jl. Sultan Hasanuddin | Ujung Pandang | 2,317 |
| 92 | Jl. Ujung Pandang | Ujung Pandang | 774 |
| 93 | Jl. Andalas | Bontoala | 575 |
| 94 | Jl. Bandang | Bontoala | 543 |
| 95 | Jl. Cumi-cumi | Bontoala | 113 |
| 96 | Jl. Masjid Raya | Bontoala | 744 |
| 97 | Jl. Sunu | Bontoala | 4,844 |
| 98 | Jl. A. Mappaodang | Mamajang | 4,378 |
| 99 | Jl. Baji Dakka | Mamajang | 960 |
| 100 | Jl. Baji Gau | Mamajang | 362 |
| 101 | Jl. Baji Minasa | Mamajang | 225 |
| 102 | Jl. Cendrawasih | Mamajang | 12,193 |
| 103 | Jl. Kakatua | Mamajang | 753 |
| 104 | Jl. Landak | Mamajang | 524 |

| JALUR TENGAH | | | |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| No. | Nama RTH | Lokasi/Kecamatan | Luas (m) ² |
| 1 | Jl. Kapasa Raya | Biringkanaya | 4,000 |

| | | | |
|----|--------------------------|---------------|--------|
| 2 | Jl. Terminal Daya | Biringkanaya | 1,200 |
| 3 | Jl. Perintis Kemerdekaan | Biringkanaya | 23,549 |
| 4 | Jl. Terminal Daya | Biringkanaya | 375 |
| 5 | Jl. Perintis Kemerdekaan | Biringkanaya | 7,359 |
| 6 | Jl. BTP Raya | Tamalanrea | 5,180 |
| 7 | Jl. Perintis Kemerdekaan | Tamalanrea | 11,150 |
| 8 | Jl. Perumnas Antang | Manggala | 400 |
| 9 | Jl. Nikel | Rappocini | 1,200 |
| 10 | Jl. Hertasning | Rappocini | 6,088 |
| 11 | Jl. A.P. Pettarani | Rappocini | 28,000 |
| 12 | Jl. Arupala | Rappocini | 1,500 |
| 13 | Jl. Kompleks IKIP | Rappocini | 563 |
| 14 | Jl. RS. Faisal | Rappocini | 75 |
| 15 | Jl. Sultan Alauddin | Rappocini | 375 |
| 16 | Jl. Racing Centre | Panakkukang | 1,301 |
| 17 | Jl. Jembatan Tallo | Panakkukang | 70 |
| 18 | Jl. Pengayoman | Panakkukang | 3,222 |
| 19 | Jl. Boulevard | Panakkukang | 4,335 |
| 20 | Jl. Nusantara | Ujung Pandang | 1,750 |
| 21 | Jl. G. Latimojong | Makassar | 1,799 |
| 22 | Jl. G. Bawakaraeng | Makassar | 270 |
| 23 | Jl. Urip Sumoharjo | Makassar | 350 |
| 24 | Jl. Veteran | Makassar | 6,350 |
| 25 | Jl. Mappanyuki | Mamajang | 300 |
| 26 | Jl. Ujung Pandang | Ujung Pandang | 464 |
| 27 | Jl. Riburane | Ujung Pandang | 209 |
| 28 | Jl. Arif Rate | Ujung Pandang | 150 |
| 29 | Jl. Bandang | Bontoala | 1,447 |
| 30 | Jl. A. Mappaodang | Tamalanrea | 985 |

| HUTAN KOTA | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| No | Nama RTH | Lokasi/Kecamatan | Luas (m) ² |
| 1 | Hutan Kota Kantor Gubernur | Panakkukang | 62,000 |
| 2 | Hutan Kota UNHAS | Tamalanrea | 416,000 |
| 3 | Hutan Kota Kampus UMI | Panakkukang | 20,000 |
| 4 | Hutan Kota Kampus UNM | Rappocini | 10,000 |
| 5 | Hutan Kota Pinggir Sungai Jeneberang | Tamalate | 18,000 |
| 6 | Hutan Kota KNPI Sudiang | Biringkanaya | 50,000 |

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------|--------|
| 7 | Hutan Kota GOR Sudiang | Biringkanaya | 20,000 |
| 8 | Hutan Kota Awwalul Islam | Biringkanaya | 15,000 |
| 9 | Hutan Kota Pesantren Darul Arqam | Biringkanaya | 2,000 |
| 10 | Hutan Kota Jl. Metro Tanjung Bunga | Mariso | 10,000 |